

POLITIK

**Demo Buruh,
Usung 11 Tuntutan**

Halaman 11

PEMERINTAHAN

**Prabowo Kaji Sekolah
& Kuliah Gratis di Negeri**

Halaman 11

OLAHRAGA

**Selangkah Menuju Emas,
Alwi Farhan : Now or Ever**

Halaman 12

KAMIS

24 SEPTEMBER 2026

Rp 15.000

TERBIT SORE

www.harian-merdeka.com

HARIAN MERDEKA

ASPIRASI RAKYAT



SENKETA PEMILU

Hakim MK Soroti KPU Tak Verifikasi Faktual Ijazah Gibran

Jakarta | **Harian Merdeka** - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempersoalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melakukan prosedur verifikasi ijazah Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Halaman 11 ➤

Skandal Suap HGB Bogor Lukai Reforma Agraria Prabowo, Menteri Nusron Dituntut Mundur



JAKARTA |
Harian Merdeka

Kasus dugaan suap penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai berpotensi mencederai agenda reforma agraria pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata harus dilihat dari proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga dari sisi tanggung jawab politik seorang menteri.

“Dasar hukum memang ada proses, tapi di luar hukum itu ada namanya moral poli-

tik,” kata Syahganda, Rabu, 23 September 2026.

Menurut Syahganda, kasus yang terjadi di lingkungan ATR/BPN muncul ketika Presiden Prabowo tengah mendorong sejumlah kebijakan terkait penertiban penguasaan lahan dan penguatan reforma agraria.

“Di saat Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan perampasan ilegal sawit sampai 5 juta hektare, tambang sekian juta hektare, di utara Banten yang dikuasai PIK diambil sama Presiden, itu semuanya membutuhkan gerakan reforma agraria,” ujarnya.

Karena itu, Syahganda menilai kasus di ATR/BPN tidak bisa dipandang sebagai persoalan hukum semata. Menurutnya, perkara tersebut berkaitan langsung dengan kredibilitas program inti pemerintahan Prabowo di bidang agraria.

“Jadi masalah ini telah mence-

lakai program inti Presiden. Jadi bukan nunggu hukum,” katanya.

Syahganda kemudian menyoroti posisi Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN. Menurut dia, seorang menteri harus menunjukkan tanggung jawab politik ketika terjadi persoalan serius di kementerian yang dipimpinnya.

“Seorang menteri harus gentlemen. Jangan dia membuat Presiden pasang perisai terhadap dirinya. Harus dia sendiri, ‘demi kehormatan Presiden Republik Indonesia sebagai pembantunya, saya tidak bisa menjaga amanah,’” ujar Syahganda.

Ia menilai tanggung jawab politik tersebut tetap relevan meskipun Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK hingga kini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB

tersebut.

Syahganda juga menyinggung empat orang yang disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Empat orang tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan OTT pada 14 September 2026. Selain empat nama tersebut, tersangka lainnya yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi.

KPK menyebut penyebutan empat orang sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron berdasarkan keterangan yang dikumpulkan penyidik serta barang bukti elektronik. Namun, hingga kini KPK belum menyatakan Nusron terlibat sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Syahganda mengatakan, apabila dirinya berada dalam posisi Nusron, pertanggungjawaban politik seharusnya diambil untuk menjaga kehormatan Presiden dan pemerintahan.

“Kalaupun saya tidak terlibat, tapi itu semua teman-teman saya yang empat orang itu dan uang Rp100 miliar juga mungkin untuk Kepala Kantor Pertanahan Bogor dan lain-lain, maka saya mengundurkan diri. Harus begitu,” tegasnya. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali R., Kabiro Medan : Umar, S.Pd. Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P. Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Dede Yusuf Tanggapi Usulan Pileg Digelar Lebih Dulu untuk Tiket Pilpres



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan menanggapi usulan Waketum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, agar pileg digelar lebih dulu dan hasilnya menjadi tiket pencalonan pilpres. Dede Yusuf mengatakan opsi tersebut sebelumnya sudah pernah dibahas dan disimulasikan di Komisi II DPR.

“Sebetulnya semua usulan itu sudah pernah dibahas di Komisi II. Kami pimpinan Komisi beserta Kapoksi mengusulkan kepada Badan Keahlian agar dibuat simulasi,” kata Dede Yusuf dikutip dari detik.com, Kamis (24/9/2026).

“Salah satu simulasinya ini, yaitu pileg agar warga itu fokus kepada calon-calon yang ada di surat pilegnya terlebih dahulu.

Baru kemudian kita berbicara presiden,” sambungnya.

Menurutnya, skema tersebut juga bisa memberikan ruang bagi partai politik yang belum memiliki calon presiden untuk lebih dulu memasarkan partai maupun calon anggota legislatifnya kepada masyarakat.

“Supaya apa? Supaya ada peluang bagi partai-partai yang tidak punya calon presiden itu juga mendapatkan kesempatan memasarkan partai atau pun calegnya. Nah, opsi-opsi ini kita berikan,” katanya.

Waketum Demokrat ini mengatakan opsi tersebut kemudian muncul kembali dalam bentuk usulan agar pileg digelar lebih dulu, baru dilanjutkan dengan pilpres. Menurutnya, skema tersebut membuat pileg dan pilpres memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda.

“Mungkin para ketua umum melihat ini sebagai opsi yang bagus dan itu pun ditangkap

dengan usulan pileg dulu baru yang kedua pilpres supaya keduanya punya magnitudo yang sama,” paparnya.

Dede menjelaskan perbedaan skema tersebut dengan konsep tiket pencalonan presiden yang berasal dari hasil pemilu sebelumnya. Dia mengatakan dalam skema yang dibahas, hasil pileg pada tahun yang sama dapat menjadi dasar pencalonan dalam pilpres.

“Yang kedua, dulu kan kita pernah dengar bahwa tiket yang sudah berlalu dipakai untuk pilpres. Nah, ini sekarang tiket yang dipakai adalah tiket yang berlangsung eh yang berlaku duluan, artinya tiket 2029 lah yang dipakai untuk Pilpres 2029,” ungkapnya.

“Jadi memang harus ada beda waktu, ada beda waktunya. Nah, apakah beda waktunya tiga bulan, empat bulan, atau enam bulan tapi di tahun yang sama,” imbuh dia. ● (Egi)

Arbi Muslim : Jika Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Dikabulkan MK, Wapres Bisa Kosong? Ini Aturan Konstitusi

JAKARTA |
Harian Merdeka

Perkara yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Di tengah proses persidangan tersebut, Direktur Gerakan Perubahan sekaligus Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan dampak putusan apabila gugatan tersebut dikabulkan MK.

Muslim berpendapat, jika putusan MK nantinya berdampak pada berakhirnya kedudukan Gibran

sebagai Wakil Presiden, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dapat berjalan meski tanpa Wakil Presiden.

“Meski nantinya MK mengabulkan gugatan Denny dan kawan-kawan yang kini sedang disidangkan, bahkan jika dimenangkan sekalipun, tidak perlu ada Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo Subianto,” kata Muslim kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Muslim kemudian merujuk pada sejumlah episode sejarah ketatanegaraan Indonesia ketika jabatan Wakil Presiden pernah tidak terisi.

Ia menyinggung pengunduran diri



Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada 1956. Muslim juga mengaitkannya dengan periode transisi pemerintahan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Setelah Soeharto berhenti, B.J. Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada periode tersebut, jabatan Wakil

Presiden juga tidak langsung terisi.

Namun, mekanisme ketatanegaraan Indonesia saat ini memiliki ketentuan yang lebih spesifik dalam UUD 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dalam waktu paling lambat 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, secara konstitusional, kekosongan jabatan Wakil Presiden memang dimungkinkan, tetapi tidak dimaksudkan untuk dibiarkan tanpa batas waktu.

Artinya, apabila dalam suatu keadaan jabatan Wakil Presiden kosong, pemerintahan tetap memiliki mekanisme untuk mengisi jabatan tersebut. Ketentuan tersebut berbeda dengan anggapan bahwa kekosongan Wakil Presiden dapat berlangsung tanpa batas selama Presiden masih menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih berada dalam proses persidangan.

Persoalan yang diajukan para pemohon menyangkut syarat pendidikan Gibran, sehingga konsekuensi hukum dari perkara tersebut sepenuhnya bergantung pada proses pemeriksaan dan putusan MK. ● (Agus)



Gaspol Bahas RUU Perampasan Aset, Komisi III Siap Kerja Lembur Saat Reses

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikerjakan Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahkan memastikan pihaknya akan bekerja secara all out dengan menjadikan RUU tersebut sebagai salah satu RUU super prioritas.

Tak hanya mengejar pembahasan pada masa sidang, Komisi III DPR RI juga berencana memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Waktu yang tersedia bahkan disebut akan dimaksimalkan hingga malam hari jika diperlukan.

“Mungkin ada sekitar delapan hari kerja di masa reses yang akan kita maksimalkan. Bahkan mungkin kalau bisa lebih, sampai malam, sampai malam kita penyerapan aspirasinya,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/9/2026).

Habiburokhman mengatakan Komisi III terus mengundang sejumlah pihak untuk memberikan masukan terkait RUU Perampasan Aset. Menurut dia, proses tersebut perlu dimaksimalkan agar pembahasan regulasi berjalan dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi.

Ia juga menepis anggapan bahwa RUU Perampasan Aset lambat dibahas di DPR RI meski rancangan tersebut telah diusulkan sejak 2008. Habiburokhman mengingatkan bahwa anggota Komisi III DPR RI yang menjabat pada periode saat ini belum duduk di Senayan ketika usulan tersebut pertama kali muncul. Selain itu, ia menjelaskan Komisi III DPR RI periode 2024-2029 terlebih dahulu memproses Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ketika awal menjabat. Menurutnya, KUHP didahulukan karena telah diusulkan sejak awal era Reformasi dan menjadi pondasi dasar penanganan hukum pidana.

“Kalau KUHP itu sejak awal reformasi, bukan lagi sejak 2008. Karena itu adalah pondasi dasar penanganan hukum pidana, KUHP,” ucap Habiburokhman.

Dengan selesainya pembahasan KUHP, Komisi III kemudian melanjutkan proses RUU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan bahwa dirinya hanya dapat mempertanggungjawabkan kinerja Komisi III yang berkaitan dengan periode saat ini. ● (Egi)

Desak Tindak Lanjut Lapas Cibinong, Komisi II DPR Siap Kawal Ombudsman



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta temuan Ombudsman RI atas dugaan penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Bogor, Jawa Barat, untuk ditindaklanjuti.

Khozin memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal Ombudsman untuk menanganikan temuan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lapas tersebut.

“Ini momentum untuk menguji apakah mekanisme tindak lanjut rekomendasi Ombudsman benar-benar efektif. Komisi II perlu memastikan hasil pengawasan Ombudsman memiliki jalur tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipantau,” kata Khozin di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa temuan Ombudsman tidak boleh berhenti sekadar menemukan masalah. Namun, rekomendasi dari Ombudsman wajib dilaksanakan.

Dia menjelaskan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman mewajibkan terlapor dan atasan

terlapor melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Selanjutnya, Komisi II DPR sebagai mitra Ombudsman akan mengawal agar tindakan korektif benar-benar dijalankan.

“Temuan tanpa tindak lanjut hanya akan menjadi catatan. Kami ingin setiap temuan Ombudsman menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik,” katanya.

Selain itu, dia menegaskan pengawasan yang dilakukan Ombudsman sudah tepat berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Dalam pasal itu, Ombudsman bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9).

Anggota Ombudsman RI

Fikri Yasin di Cibinong, mengatakan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

“Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada,” kata Fikri.

Fikri mengatakan Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di beberapa bagian. Sejumlah fasilitas dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan memasak.

Menurut dia, Ombudsman juga mendapati sekitar enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan berada secara terpisah di kawasan tersebut. Namun, Ombudsman belum dapat memastikan identitas maupun status seluruh orang yang berada di fasilitas itu.

Tim Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta sejumlah botol minuman beralkohol di tempat pembuangan sampah kawasan lapas. ● (Egi)

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pengguna media sosial mengungkapkan pengalaman yang mengejutkan setelah mengaku mendapati sejumlah transaksi bernilai puluhan juta rupiah pada kartu kredit BCA miliknya, padahal merasa tidak melakukan transaksi tersebut.

Unggahan akun X (Twitter) @marthaningrum yang terlihat pada Rabu (23/9/2026) memperlihatkan tangkapan layar aplikasi kartu kredit dengan beberapa transaksi yang tercatat pada 19 September 2026.

Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menulis, “Selama ini merasa secure dgn data kartu kredit BCA, tapi tiba-tiba DUAAR kena bobol jg hampir 30jt.”

Dari tangkapan layar yang diunggah, terlihat sedikitnya dua transaksi dengan nilai besar. Transaksi pertama tercatat sebesar Rp9.096.936, sedangkan transaksi berikutnya sebesar Rp10.056.258. Keduanya tercatat dengan keterangan “DANA QR *Lazad*20260919OJAKARTA SLT ID” dan mencantumkan BCA BLIBLI TIKET.

Jika kedua transaksi tersebut



dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp19,15 juta. Tangkapan layar juga memperlihatkan transaksi lain dengan nominal Rp9.096.936, sehingga total transaksi yang ditampilkan dalam gambar mendekati Rp28,25 juta.

Pemilik akun menyebut dirinya merasa selama ini telah menjaga keamanan data kartu kredit. Namun, unggahan tersebut belum menjelaskan secara rinci

bagaimana transaksi tersebut dapat terjadi, apakah kartu masih berada dalam penguasaan pemilik, maupun apakah sebelumnya terdapat aktivitas pada akun atau perangkat yang berkaitan dengan transaksi.

BCA sendiri mengingatkan nasabah agar berhati-hati terhadap berbagai modus penyalahgunaan kartu kredit. Dalam informasi resmi yang diperbarui pada

September 2026, BCA menyebut modus penipuan perbankan berkembang melalui berbagai cara, termasuk pihak yang menghubungi korban dan mengaku sebagai BCA dengan alasan adanya transaksi mencurigakan.

BCA juga menegaskan agar nasabah tidak memberikan data rahasia seperti nomor kartu, masa berlaku, CVV/CVC maupun kode OTP kepada pihak lain.

Apabila menemukan transaksi yang tidak dikenali, nasabah dapat melakukan pengaduan melalui Halo BCA 1500888, kantor cabang BCA, atau kanal resmi lainnya. BCA juga menyediakan fitur kontrol kartu kredit melalui BCA mobile, myBCA, maupun Halo BCA untuk mengatur jenis transaksi yang diperbolehkan, termasuk transaksi e-commerce.

Meski pemilik akun menyebut kartunya “kena bobol”, status tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan tangkapan layar. ● (Egi)

Ferdinand Soroti Sengketa Eks Hotel Anggrek: Jangan Biarkan Hukum Jadi Alat Rampok Tanah



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Sengketa lahan eks Hotel Anggrek di kawasan Batu Gajah, Ambon, kembali mendapat sorotan. Kali ini, Praktisi Hukum Ferdinand Hutahaean meminta Mahkamah Agung dan DPR RI memberi perhatian terhadap persoalan tanah yang mencuat di Ambon.

Ferdinand menyampaikan pernyataan tersebut setelah menerima banyak keluhan masyarakat melalui pesan langsung di akun media sosialnya. Menurut dia, sejumlah warga mengaku meng-

hadapi persoalan tanah dengan pola yang mereka anggap serupa.

Ia kemudian mengaitkan keluhan tersebut dengan sengketa lahan eks Hotel Anggrek yang melibatkan keluarga ahli waris dan Koalisi Ambon Transparan (KAT).

Ferdinand Minta MA Beri Perhatian

Dalam pernyataannya, Ferdinand meminta Ketua Mahkamah Agung memperhatikan persoalan yang berkembang di Ambon, terutama terkait proses hukum atas sengketa tanah.

“Jangan kita biarkan hukum dipergunakan sebagai instrumen oleh para maling. Hukum ini dibuat adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujar Ferdinand, dikutip dari akun tiktok pribadi miliknya, Kamis (24/9/2026).

Ia juga menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan kepastian serta menjadi sarana

untuk mencari kebenaran. Karena itu, Ferdinand meminta persoalan sengketa tanah di Ambon mendapat perhatian serius.

Eksekusi Eks Hotel Anggrek Tetap Berjalan

Pengadilan Negeri Ambon menjadwalkan eksekusi lahan eks Hotel Anggrek pada 17 September 2026. KAT bersama keluarga yang mengaku sebagai ahli waris Simon Latumalea menolak pengosongan dan memilih bertahan di lokasi untuk mengawal proses tersebut.

KAT mempertanyakan sejumlah hal, termasuk kesesuaian objek eksekusi dengan lahan yang sebelumnya menjalani eksekusi pada 2011. Mereka juga menyoroti riwayat pelepasan sebagian lahan, status sejumlah bidang, serta dokumen yang menjadi dasar pembuktian.

Di sisi lain, perkara perdata Markus Sahurilla telah sampai

tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4031 K/Pdt/2025. PN Ambon juga menyatakan adanya laporan atau perkara pidana lain tidak otomatis menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Dugaan Dokumen Palsu Masuk Proses Hukum

Persoalan semakin kompleks karena pihak keluarga Muskita dan Lokollo sebelumnya melaporkan dugaan persoalan keaslian sejumlah dokumen tanah. Informasi dari pihak pelapor menyebut Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri melalui laporan LAB: 2822/DTF/2024 menemukan karakteristik pencetakan menggunakan teknik ink jet serta persoalan terkait jenis kertas dan watermark.

Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease disebut menetapkan Markus Sahurilla, Rosina Sahurilla, dan Fredy Julius Nanulaita sebagai tersangka. ● (Agus)

SERANG | **Harian Merdeka**

Ditreskrimsus Polda Banten Bongkar Tambang Batubara Ilegal di Lebak

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menyisir lokasi dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal di Kampung Cidahu, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan lima lubang tambang batubara yang dioperasikan secara manual dan tersebar di tiga lokasi berbeda.

Kabidhumas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membeberkan, pengungkapan ini berawal dari surat perintah tugas penyelidikan yang diterbitkan sejak awal September 2026. "Pada TKP pertama, petugas menemukan dua lubang tambang kedalaman sekitar 20 meter yang diduga milik AA. Kegiatan ini terdeteksi beroperasi sejak Agustus 2026," ujar Maruli, Rabu, 23 September 2026.

Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan satu lubang tambang sedalam 40 meter milik AU yang telah beraktivitas sejak Juli 2026. Adapun di lokasi ketiga, ditemukan dua lubang tambang berkedalaman 50 meter milik HE yang diduga sudah beroperasi sejak Mei 2026.

Dari ketiga lokasi tersebut,



polisi menyita sejumlah barang bukti berupa alat penggalian seperti jack hammer, blower, cangkul, peralatan evakuasi, hingga beberapa karung sampel batubara hasil penambangan liar. "Kami telah melakukan

pemeriksaan lapangan serta mengamankan sejumlah barang terkait aktivitas penambangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendukung proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Maruli menegaskan, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan guna mengusut tuntas keterlibatan para pemilik lubang serta pihak lain yang bertanggung jawab atas aktivitas tambang ilegal tersebut. ● (Egi)

Temukan Sel Mewah dan Minuman Beralkohol, Ombudsman Sidak Lapas Cibinong

BOGOR |
Harian Merdeka

Pemeriksaan mendadak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, membuka temuan baru di balik kawasan pemasyarakatan tersebut.

Tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah yang memiliki fasilitas menyerupai hunian apartemen. Sejumlah warga binaan juga ditemukan berada di area yang terpisah dari blok hunian umum.

Temuan itu muncul ketika Ombudsman kembali melakukan inspeksi ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.



Pemeriksaan ini menjadi sidak kedua Ombudsman ke lapas tersebut sepanjang 2026.

Temukan Kamar Bak Apartemen

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan bangunan-bangunan tersebut berada di bagian belakang lapas. Lokasinya terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya dan berada di kawasan yang relatif tertutup.

Fasilitas di dalamnya disebut cukup lengkap,

mulai ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas hingga perlengkapan rumah tangga. Ombudsman menilai kondisi sejumlah bangunan tersebut menyerupai hunian apartemen meski ukurannya relatif kecil.

Selain fasilitas hunian, tim juga menemukan sejumlah fasilitas lain seperti perlengkapan olahraga serta kendaraan yang disebut mewah di kawasan tersebut.

Ombudsman juga menemukan sekitar enam hingga tujuh warga binaan yang berada secara terpisah. Salah seorang yang ditemui tim disebut mengaku membayar untuk dapat menempati fasilitas tersebut.

Namun, Ombudsman belum mendapatkan informasi lengkap mengenai mekanisme pembayaran maupun besaran uang yang dikeluarkan. Pemeriksaan terhadap penghuni juga belum seluruhnya dapat dilakukan karena situasi di lokasi.

Ada Minuman Beralkohol

Temuan lain muncul ketika tim memeriksa sejumlah bangunan. Ombudsman menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta botol minuman beralkohol di area tempat pembuangan sampah.

Ombudsman menegaskan belum dapat memastikan siapa pemilik atau pengguna minuman

tersebut. Karena itu, keberadaan barang tersebut masih menjadi bagian dari temuan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Fikri mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan maladministrasi serta memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.

Akses Ombudsman Sempat Dihalangi

Proses pemeriksaan di Lapas Cibinong juga berlangsung tegang. Tim Ombudsman mengaku sempat menghadapi hambatan ketika hendak memasuki area belakang lapas meski telah membawa surat resmi dan menjalankan mandat pengawasan. ● (Egi)

Beri Penghargaan Aksi Kemanusiaan, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Bermanfaat



JAKARTA |
Harian Merdeka

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri memberikan penghargaan kepada tiga personel yang berdedikasi dan melakukan aksi kemanusiaan dalam membantu masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam Apel Perwira Menengah (Pamen) Satuan Kerja (Satker) Polda Metro Jaya di Lapangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Asep mengapresiasi tindakan ketiga personel tersebut dan menilai pertolongan yang terkesan sederhana dapat memberikan dampak besar bagi warga yang sedang membutuhkan bantuan.

“Hal yang mereka lakukan mungkin kecil, tapi bagi masyarakat yang menikmatinya, itu salah satu hal

yang luar biasa,” kata Asep.

Dia juga mengingatkan para pejabat utama dan pimpinan satuan kerja agar terus membimbing personel untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab serta menjaga etika dalam memberikan pelayanan publik.

“Tidak boleh menyakiti hati masyarakat, siapa pun itu. Dan yang kedua, jadilah polisi yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Asep. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan penghargaan dari pimpinan itu menjadi bentuk apresiasi nyata atas kepekaan anggota di lapangan.

“Ini menjadi apresiasi bagi anggota yang hadir dan memberikan pertolongan ketika masyarakat membutuhkan. Semangat untuk peduli dan memberi manfaat seperti ini perlu terus tumbuh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tutur

Budi.

Ketiga personel yang menerima apresiasi tersebut, yakni Kanit Samapta Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan Iptu Rahmat Gunawan, yang menolong korban pencopetan sekaligus membelikan tiket kereta api untuk melanjutkan perjalanan.

Kemudian, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pondok Cabe Polsek Pamulang Polres Tangerang Selatan Aiptu Dadang, yang memberikan pertolongan pertama kepada warga yang mengalami serangan jantung hingga mendapatkan penanganan medis.

Lalu, Banit Unit 4 Satpatwal Ditlantas Polda Metro Jaya Brigadir Muhammad Ferdiansyah, yang memberikan bantuan uang tunai serta helm berstandar SNI kepada seorang pengemudi ojek daring.

● (Egi)



Polda Banten Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran Lewat Program Poliran

SERANG | **Harian Merdeka**

Dalam rangka memperkuat sinergi antara Polri dan dunia usaha dalam mengurangi angka pengangguran sekaligus mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, Polda Banten melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Gyokai Indonesia Kompeten terkait penyaluran peserta Program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) Polda Banten.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di PT LPK Gyokai Indonesia Kompeten, Jalan Pesona Wibawa Praja, Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (23/09). Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandi, pimpinan PT Gyokai Indonesia Tbk CEO Teguh Imam Pamudi, para PJU Polda Banten, Forkopimda Kabupaten Tangerang, serta para pimpinan dan perwakilan perusahaan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, persoalan pengangguran merupakan tantangan yang perlu dihadapi secara bersama karena tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan persoalan sosial dan kamtibmas.

“Pengangguran masih menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Masih banyak anak-anak muda yang memiliki semangat dan potensi, namun belum memperoleh keterampilan maupun akses yang memadai menuju dunia kerja,” ujar Kapolda Banten.

Kapolda menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Polda Banten menghadirkan Program Poliran sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, menjaga keamanan tidak hanya dilakukan ketika gangguan kamtibmas terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan dengan menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber kerawanan. ● (Egi)

Sidang Perdana Cerai Sara Wijayanto-Demian Aditya

JAKARTA | **HARIAN MERDEKA**

Sidang perdana perceraian pasangan selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya digelar hari ini, Kamis (24/9/2026), di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Informasi tersebut disampaikan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid M.H. Ia membenarkan agenda sidang perdana perkara perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya.

"Iya, sidang perdana tanggal 24 (September 2026)," kata Abid M.H. kepada detikcom di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Sidang perdana tersebut menjadi tahapan awal proses hukum perceraian pasangan yang selama ini dikenal sebagai

salah satu pasangan selebritas di Tanah Air.

Dalam persidangan perdana, majelis hakim pada umumnya akan memeriksa identitas dan kehadiran para pihak serta mengupayakan proses perdamaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Belum diketahui secara rinci materi gugatan maupun alasan perceraian Sara Wijayanto dan Demian Aditya. Perkembangan perkara selanjutnya akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. ● (hmi)





Dilantik Ali Mahsun, Pengurus DPP APKLI Merah Putih Akan Dikukuhkan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih Periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan dr. Ali Mahsun Atmo akan menggelar pelantikan pengurus dan Rapat Kerja (Raker) DPP pada 17 Oktober 2026 di Jakarta. Rangkaian agenda tersebut akan ditutup dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta pengukuhan resmi oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, pada 8 November 2026.

Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., menjelaskan bahwa kabinet bertajuk “Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia” ini dibentuk berdasarkan hasil Munas ke-6 yang diselenggarakan di Asrama Haji Jakarta, 25–27 Agustus 2026 lalu. “Pelantikan pengurus dan Raker DPP pada 17 Oktober nanti akan diikuti oleh 116 personel inti, mulai dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Harian, 11 Wakil Ketua Umum, hingga jajaran ketua bidang dan departemen,” ujar Ali Mahsun dalam arahannya pada Rapat Bidang Media, Komunikasi, dan Hubungan Masyarakat di Pendopo ABNnews.id, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Rabu (23/9/2026).

Dalam Raker DPP 17 Oktober mendatang, ke-11 Wakil Ketua Umum akan memaparkan blue print serta program kerja tahunan hingga lima tahun ke depan beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang masing-masing. Hasil dari Raker tersebut selanjutnya akan dibawa sebagai materi utama dalam Rakernas.

Ali Mahsun menambahkan, Rakernas APKLI Merah Putih yang dijadwalkan dibuka oleh Sufmi Dasco Ahmad pada 8 November 2026 dipastikan akan dihadiri oleh struktur kepemimpinan lengkap. Selain 116 personel DPP, forum nasional ini juga akan diikuti oleh utusan dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

● (Egi)

PT.KAI Dapat Rapor Merah DPR

JAKARTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero meningkatkan layanan sarana, prasarana, dan keselamatan. Hal ini seiring meningkatnya jumlah warga atau pengguna transportasi kereta api.

Hal itu disampaikan Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama manajemen PT KAI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 23 September 2026. Dalam evaluasinya terhadap kinerja KAI pada Semester I 2026, Asep menggunakan matriks status hijau-kuning-merah terhadap lima dimensi kinerja perusahaan.

Hasilnya, kinerja keuangan dan kemudahan akses berada pada status kuning. Sementara kecukupan sarana, kecukupan prasarana, dan keselamatan mendapat status merah.

Ia menegaskan, penilaian tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan agar kereta api sebagai moda transportasi publik yang terus dikembangkan PT KAI semakin dinikmati secara luas oleh masyarakat. Dengan jumlah penumpang yang terus tumbuh hingga hampir 259 juta pelanggan pada semester ini, kesiapan sarana, prasarana, dan keselamatan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kami mengapresiasi pertumbuhan bisnis inti KAI. Kereta api adalah moda transportasi publik yang paling efisien dan terjangkau, dan kami ingin semakin banyak warga bisa menikmatinya,” kata Asep dalam keteragannya, Rabu 23 September 2026.

Menurut Asep, pertumbuhan pelanggan tidak boleh dibayar dengan keselamatan. “Yang ingin dirasakan penumpang adalah kereta yang tepat waktu, tidak berdesakan,



dan selamat sampai tujuan,” kata Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu.

Terkait kecukupan sarana, Ketua DPP Partai NasDem itu menyoroti penarikan tujuh rangkaian KRL baru buatan INKA sejak awal September yang sempat berdamak pada pengurangan 17 perjalanan pada jam sibuk di lintas Bogor.

“Tujuh rangkaian ditarik saja, penumpang lintas Bogor langsung berdesakan. Artinya, sistem kita tidak punya cadangan, ini harus dibenahi sebelum lonjakan penumpang berikutnya,” kata Asep.

Di bidang keselamatan, Asep merujuk pada tragedi Bekasi Timur yang merenggut 16 nyawa. Serta 134 kecelakaan di perlintasan sebidang hingga Juni 2026.

“Indikator keselamatan tidak boleh hanya menghitung kecelakaan kereta. Kecelakaan di perlintasan dan jumlah korban jiwa harus ikut dilaporkan. Nyawa penumpang dan warga tidak boleh hilang dari statistik,” ucap alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu.

Agar penilaian tersebut menjadi pijakan perbaikan, Asep lantas mendorong PT KAI untuk melakukan lima langkah upaya pembenaan. Pertama, menyampaikan jadwal dan anggaran pemasangan Automatic Train Protection (ATP), dimulai dari lintas dengan

kepadatan tertinggi.

Kedua, melaporkan indikator keselamatan setiap triwulan kepada Komisi VI, termasuk kecelakaan di perlintasan dan jumlah korban. Ketiga, menyusun simulasi kondisi ideal layanan yang meliputi target kepadatan, headway, cadangan armada, dan kebutuhan prasarana.

Kemudian, yang keempat, menyampaikan rencana pemulihan laba serta kejelasan dampak pengalihan saham PSBI terhadap neraca perusahaan. Kelima, menetapkan syarat yang terukur sebelum mendapat dukungan atas permohonan perusahaan, termasuk pengadaan KRL dan dispensasi impor sarana bukan baru.

Menurut Asep, seluruh perbaikan tersebut akan memperkuat KAI dalam mewujudkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 serta visinya menjadi operator perkeretaapian kelas dunia. Aekaligus penggerak ekosistem mobilitas nasional.

Komisi VI, lanjutnya, siap mengawal dan mendukung langkah-langkah tersebut sepanjang disertai target, tenggat waktu, dan akuntabilitas yang terukur. “Kami ingin KAI berhasil, karena keberhasilan KAI berarti semakin banyak warga, dari kota besar hingga daerah, yang bisa bepergian dengan kereta secara aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Asep.

● (Egi)

Kortas Tipikor Geledah Rumah Bupati Gowa Sitti Husniah, Adik Fadil Imran

GOWA | **Harian Merdeka**

Kantor dan rumah jabatan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang digeledah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri pada Senin, 21 September 2026.

Pengeledahan tersebut berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi Perizinan Bangunan dan Gedung (PBG) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dua tempat yang menjadi sasaran pengeledahan aparat kepolisian yakni Kantor Bupati Gowa dan Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Proses pengeledahan berlangsung selama beberapa jam, dimulai dari pukul 15.55 WITA hingga berakhir pada pukul 20.17 WITA.

Penyidik membawa tiga box dokumen dari Kantor Bupati Gowa serta

menyita dua box barang bukti tambahan dari Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Pol Hernowo Yulianto, menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan turut melibatkan Unit Tipikor Polda Sulsel dan Polresta Gowa.

"Kami melakukan rangkaian proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proses perizinan PBG dan perizinan lainnya," ujarnya.

Hernowo melanjutkan, seluruh barang bukti yang disita berkaitan erat dengan dugaan kasus korupsi perizinan tersebut.

Pelaksanaan operasi penindakan telah sesuai prosedur resmi dan polisi dibekali surat perintah pengeledahan yang ditetapkan pengadilan.



Pihak kepolisian belum membeberkan status maupun posisi hukum Bupati Gowa dalam perkara tersebut, namun memastikan yang bersangkutan tidak berada di tempat saat tindakan pengeledahan berlangsung.

"Tidak ada, tidak ada (Ibu Bupati saat pengeledahan)," tandas Hernowo.

Lantas siapa Sitti Husniah Talenrang lebih jauh?

Sitti Husniah Talenrang yang

populer disapa Husniah Talenrang merupakan tokoh perempuan yang aktif di panggung politik dan organisasi Sulawesi Selatan.

Husniah lahir di Ujung Pandang pada 20 Maret 1977 dari pasangan H. Abdul Hamid Daeng Naba dan Hj. Sitti Siada Daeng Siang.

Husniah merupakan adik kandung dari perwira tinggi kepolisian, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran.

● (Egi)

Hadiri Dies Natalis, Kajati Jabar Dampingi Wakil Jaksa Agung Sampaikan Orasi Ilmiah

BANDUNG |
Harian Merdeka

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat M. Teguh Darmawan mendampingi Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. dalam menghadiri kegiatan Dies Natalis ke-68 Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) sekaligus Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 yang bertempat di Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (23/09/2026).

Dies Natalis ke-68 Sekolah Tinggi Hukum Bandung mengusung tema "STHB sebagai Pilar Pendidikan Tinggi Hukum dalam Mendukung Pembaruan Hukum Nasional yang Sesuai dengan Jiwa Bangsa Indonesia." Tema tersebut merefleksikan peran perguruan tinggi hukum dalam berkontribusi



terhadap pengembangan dan pembaruan hukum nasional yang tetap berlandaskan nilai-nilai serta kara-

cter bangsa Indonesia.

Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 tersebut diikuti oleh

para wisudawan yang terdiri atas mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Momentum ini menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik para lulusan sekaligus menandai keberhasilan mereka dalam menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut disampaikan orasi ilmiah oleh Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. dengan tema "Modernisasi Hukum Nasional di Tengah Transformasi Masyarakat: Meneguhkan Keadilan, Kepastian, dan Jiwa Bangsa Indonesia."

Orasi ilmiah tersebut mengangkat pentingnya modernisasi hukum nasional dalam merespons berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai keadilan, kepastian hukum, serta jati diri dan karakter

PRABOWO KAJI SEKOLAH

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Saat ini, terdapat sekitar 164.000 sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah

negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dikutip dari siaran pers, Rabu (23/9/2026).

Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi.

Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.

“Dalam 2–4 minggu ke depan,

pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” jelas Teddy.

Perhatian ke Pesantren

Di sisi lain, pemerintah turut memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Teddy menyampaikan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai wadah khusus yang menangani urusan pesantren.

Pembentukan direktorat jenderal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memajukan pendidikan pesantren memperoleh perhatian dan dukungan dalam penguatan pendidikan nasional.

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” tutur Teddy. ● (Egi)

DEMO BURUH

Ribuan buruh akan menggelar aksi damai atau demonstrasi di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dijadwalkan bergerak dari kawasan Semanggi menuju Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dengan mengusung 11 tuntutan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memastikan aksi tidak akan memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) maupun Menteng.

Massa akan berkumpul di kawasan Semanggi sebelum bergerak menggunakan konvoi sepeda motor menuju depan Menara UOB di Jalan MH Thamrin.

“Kami juga tidak akan menyentuh Bundaran HI. Tidak. Karena nanti khawatir dipolitisasi, ‘Oh kalau Koalisi Besar dibolehkan tembus ke HI, mahasiswa dilarang,’ nah ini kan mau memecah belah,” kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).

Aksi tersebut merupakan bagian dari agenda KBPBI untuk menyampaikan aspirasi terkait

perlindungan dan kesejahteraan pekerja, terutama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, KBPBI telah mendesak DPR merespons usulan buruh untuk dimasukkan ke dalam draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Koalisi tersebut memberikan tegang kepada DPR hingga 22 September 2026 untuk memberikan respons terhadap aspirasi mereka.

Selain menggelar aksi, perwakilan KBPBI dijadwalkan menyerahkan petisi dan aspirasi buruh kepada pemerintah.

Sekitar pukul 09.00 WIB, sejumlah pimpinan konfederasi buruh akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Bina Graha. Petisi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi jam 09.00 WIB pagi itu, ada pimpinan buruh yang memimpin aksi massa langsung, dan ada juga yang mengirimkan petisi, surat pada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” ujar Andi.

Aksi Disebut sebagai Pilihan Terakhir

Andi mengatakan aksi tersebut merupakan pilihan terakhir setelah pihaknya menempuh jalur diplomasi selama sekitar empat bulan. “Pilihan ini pilihan yang sangat-sangat terakhir buat kami,” katanya.

Dia juga membantah anggapan aksi tersebut berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Andi, hubungan buruh dengan Presiden Prabowo tetap baik dan pemerintah masih membuka ruang dialog dengan kelompok buruh.

11 Tuntutan Buruh

Berikut tuntutan yang disampaikan:

1. Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada kepentingan buruh.
2. Menjamin kepastian kerja, termasuk menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak serta mencegah penyalahgunaan program pemagangan.
3. Menjamin hak atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem

koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.

4. Melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim.

5. Menjamin hak pesangon dan mencegah PHK sepihak.

6. Memperkuat serikat pekerja dan menjamin kebebasan berserikat.

7. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai bagian utama pembangunan.

8. Memperkuat sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melanggar hak-hak buruh.

9. Menjamin perlindungan buruh perempuan, termasuk terkait hak cuti haid.

10. Membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan kelompok pekerja rentan lainnya.

11. Menjalankan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan kembali (reskilling) bagi buruh untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat teknologi dan otomatisasi.

● (Egi)

HAKIM MK SOROTI

Saldi mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan sebagaimana yang diwajibkan dalam pilkada.

Hal disorot Saldi saat berdialog dengan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, pada Rabu malam, 23 September 2026.

“Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang diper-

soalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas?” tanya Saldi kepada Afifuddin.

Afifuddin kemudian menjawab bahwa KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan. Menurutnya, KPU saat itu telah menerima surat keterangan resmi terkait persyaratan pendidikan tersebut.

“Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,” jawab Afifuddin.

Mendengar jawaban tersebut, Saldi kemudian membandingkan proses verifikasi yang dilakukan KPU pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pilkada.

“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” tanya Saldi.

“Tidak datang,” jawab Afifuddin.

Saldi kemudian menilai proses tersebut penting untuk ditan-

yakan karena dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU justru meminta jajaran di daerah melakukan pengecekan secara langsung terhadap dokumen persyaratan pendidikan para calon.

“Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali Pak bilang ke KPU-nya, ‘tolong dicek ke mana sekolahnya? Kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya?’ segala macam. Nah, ini makanya penting ditanyakan tadi,” kata Saldi.

● (Egi)

SELANGKAH MENUJU EMAS, ALWI FARHAN : NOW OR EVER

JAKARTA |
Harian Merdeka

Alwi Farhan bangga bisa sumbang poin bagi tim beregu putra Indonesia di semifinal Asian Games 2026. Ia dan rekan-rekannya selangkah lagi menuju emas.

Tampil di partai ketiga laga Indonesia vs Thailand, Alwi sukses memenangkan laga melawan Puritat Arree, pada Rabu (23/9/2026).

Laga itu ia tuntaskan dalam dua gim langsung 21-15, 21-13, sekaligus membawa keunggulan tim beregu putra menjadi 2-1. Kemudian Leo/Daniel tuntaskan perjuangan, Indonesia menang 3-1 dan lanjut ke final.

"Alhamdulillah cukup senang bisa kembali

dipercaya untuk turun sebagai tunggal kedua dan Alhamdulillah bisa menyumbangkan poin. Bangga tapi pastinya belum puas karena kita tahu target kami adalah medali emas," kata Alwi.

Alwi memang tak ingin menyia-nyiaakan kesempatan untuk bisa menang cepat. Ia sadar betul tampil di Asian Games tidak mudah. Makanya, kesempatan yang diberikan kepadanya bakal dimaksimalkan sebaik-baiknya. Termasuk babak penentuan menembus final beregu putra Asian

Games.

"Dari kemarin kami di tim terus berpegang teguh pada prinsip now or never. Karena kita enggak tahu ada kesempatan berapa lama lagi," tuturnya.

"Asian Games kan empat tahun sekali jadi kesempatan ini harus dijadikan hal yang sangat amat bermakna untuk bisa menyumbang medali emas untuk masyarakat Indonesia dan keluarga."

Alwi Farhan dan kawan-kawan masih menunggu lawan di babak final beregu putra. Antara India atau China.

"Kalau ke final, bertemu siapa pun tidak ada yang mudah. Yang penting kita fokus pada diri kita," tegas Alwi. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

